

## **Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Era Imperium Mughal**

Sohif Maftahal Luthfi<sup>1\*</sup>, Sa'adi<sup>2</sup>, Rahmat Haryadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Salatiga, Jl. Lingkar Salatiga, Km. 02, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah  
sohifmaftahalluthfi@gmail.com

### **Abstract**

This study aims to analyze the trends of Islamic educational institutions during the Mughal Dynasty in India (1526-1857 AD) and their relevance to the development of contemporary Islamic education in Indonesia. The Mughal Dynasty is known as the pinnacle of intellectual civilization in South Asia, successfully integrating religious and rational sciences. The research method used is qualitative with a historical-phenomenological study approach through content analysis techniques of various related primary and secondary literature. The results show that the success of Mughal education was driven by three main factors: the implementation of the Dars-i-Nizami curriculum that emphasizes logic (mantiq) and philosophy (hikmah), the state patronage system through land grants (Madad-i-Ma'ash), and the use of Persian as a medium of intellectual unification. Interconnected analysis through the lens of Ibn Khaldun's sociology and the epistemology of Tauhidul 'Ulum reveals that Mughal education functioned as an effective state-building instrument in maintaining sociopolitical stability. This study concludes that the model of integration of knowledge and economic independence of Mughal-era institutions is highly relevant for adaptation in the madrasah and pesantren systems in Indonesia, particularly in efforts to strengthen students' critical thinking and ensure institutional autonomy through the Pesantren Endowment Fund policy.

**Keywords:** Islamic Education, Mughal Dynasty, Dars-i-Nizami, Integration of Knowledge

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren lembaga pendidikan Islam pada era Dinasti Mughal di India (1526-1857 M) serta relevansinya terhadap pengembangan pendidikan Islam kontemporer di Indonesia. Dinasti Mughal dikenal sebagai puncak peradaban intelektual di Asia Selatan yang berhasil mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi historis-fenomenologis melalui teknik analisis konten terhadap berbagai literatur primer dan sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan Mughal didorong oleh tiga faktor utama yaitu penerapan kurikulum Dars-i-Nizami yang menekankan pada logika (mantiq) dan filsafat (hikmah), sistem patronase negara melalui hibah tanah (Madad-i-Ma'ash), serta penggunaan bahasa Persia sebagai media unifikasi intelektual. Analisis interkoneksi melalui lensa sosiologi Ibnu Khaldun dan epistemologi Tauhidul 'Ulum mengungkap bahwa pendidikan Mughal berfungsi sebagai instrumen pembangunan negara (state-building) yang efektif dalam menjaga stabilitas sosiopolitik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model integrasi ilmu dan kemandirian ekonomi lembaga era Mughal sangat relevan untuk diadaptasi dalam sistem madrasah dan pesantren di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat nalar kritis siswa serta menjamin otonomi institusi melalui kebijakan Dana Abadi Pesantren.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Dinasti Mughal, Dars-i-Nizami, Integrasi Ilmu

Copyright (c) 2026 Sohif Maftahal Luthfi, Sa'adi, Rahmat Haryadi

✉ Corresponding author: Sohif Maftahal Luthfi

Email Address: [sohifmaftahalluthfi@gmail.com](mailto:sohifmaftahalluthfi@gmail.com) (Jl. Lingkar Salatiga, Km. 02, Kota Salatiga, Jawa Tengah)

Received 30 May 2026, Accepted 08 June 2026, Published 22 June 2026

## **PENDAHULUAN**

Imperium Mughal (1526-1857 M) merepresentasikan puncak inkubasi budaya dan intelektual yang sangat signifikan di wilayah Asia Selatan. Era ini tidak hanya dipandang sebagai dominasi kekuatan militer semata, tetapi juga menjadi fase transformasi peradaban di mana India bertransformasi menjadi titik temu bagi para ulama, filsuf, dan ilmuwan dari Persia serta Asia Tengah. Kepemimpinan kaisar yang bervariasi, mulai dari pendekatan inklusif Sultan Akbar hingga corak ortodoksi Sultan Aurangzeb, menciptakan dinamika intelektual yang sangat kaya di tengah masyarakat plural. Stabilitas

ekonomi yang kokoh pada masa tersebut mendukung terciptanya sistem bantuan finansial negara yang terstruktur bagi institusi agama dan pendidikan melalui mekanisme hibah tanah yang dikenal sebagai *Madad-i-Ma'ash* (Agustin & Arbi, 2024). Kebijakan sistematis ini menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial serta mencetak kelas birokrat yang terampil di bawah naungan kekaisaran.

Gejala intelektual yang menonjol pada periode ini terlihat pada kemunculan kurikulum *Dars-i-Nizami* yang dirancang oleh Mulla Nizamuddin Sihlawi, yang secara radikal mengubah lanskap pedagogi di madrasah-madrasah India. Standar pendidikan ini merevolusi cara pandang lembaga keagamaan yang sebelumnya cenderung kaku dan hanya berfokus pada teks-teks hukum klasik atau fikih semata. Era Mughal memperkenalkan tren integrasi ilmu alat yang tajam, sehingga madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengajaran *Al-Qur'an*, tetapi bertransformasi menjadi pusat pembelajaran logika (*mantiq*), filsafat (*hikmah*), dan matematika. Kehadiran institusi monumental seperti *Farangi Mahall* di Lucknow menjadi bukti empiris bagaimana lembaga pendidikan Islam mampu berevolusi menjadi semacam universitas multidisiplin yang melahirkan kaum intelektual sekaligus birokrat handal (Robinson, 2021).

Integrasi ilmu pengetahuan yang masif ini didorong oleh kebutuhan sosiologis dan politik yang sangat mendasar dalam struktur kekuasaan Mughal. Birokrasi kekaisaran yang sangat luas memerlukan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki nalar analitis tinggi guna mengelola urusan administrasi, hukum, dan diplomasi internasional yang rumit. Selain kebutuhan praktis tersebut, pengaruh tradisi intelektual Persia yang kuat turut membawa apresiasi tinggi terhadap ilmu-ilmu rasional atau *ma'qulat* ke dalam ruang-ruang kelas di India. Sinergi antara kepentingan negara dan visi pendidik menciptakan sebuah simbiosis unik, pemerintah memberikan jaminan ketersediaan fasilitas, sementara madrasah menyediakan kurikulum berbasis logika-filsafat untuk mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang cerdas secara intelektual (Hossain, 2023).

Keberhasilan sistem ini menjadikan pendidikan Islam di India sebagai salah satu model pendidikan paling rasional di dunia Muslim pada masanya. Perpaduan antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam menghasilkan lulusan yang kompeten dalam menghadapi realitas sosial yang majemuk. Namun, masuknya kekuatan kolonial Inggris melalui *East India Company* (EIC) mengakibatkan runtuhnya pilar-pilar pendukung ekonomi pendidikan tradisional secara perlahan. Lembaga pendidikan yang sebelumnya bersifat ekspansif dan inklusif mulai menarik diri menjadi pusat-pusat konservatisme demi memproteksi identitas Muslim dari pengaruh penetrasi Barat. Pasca keruntuhan Mughal, sisa-sisa tradisi intelektual ini memicu lahirnya institusi besar seperti *Darul Uloom Deoband* dan *Aligarh* yang memiliki orientasi berbeda, namun tetap berpijak pada akar sejarah yang sama (Darmawan et al., 2024).

Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun sejarah politik dan kebudayaan Mughal telah banyak dibahas, sebagian besar studi masih terjebak pada dikotomi tajam antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler. Masih terdapat ruang kosong dalam penelitian yang secara mendalam mengkaji bagaimana penerapan logika klasik atau *mantiq* dalam kurikulum Mughal sebenarnya berfungsi sebagai

instrumen pendidikan karakter yang membentuk pola pikir saintifik sebelum penetrasi sains modern. Analisis mengenai kaitan antara estetika arsitektur lembaga pendidikan dengan psikologi belajar para penuntut ilmu pada masa itu juga masih sangat jarang ditemukan dalam diskursus akademik saat ini. Kesenjangan informasi ini menuntut adanya tinjauan ulang yang lebih holistik udhguna memahami esensi pendidikan Islam di India secara lebih komprehensif (Juliansyah, 2025).

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya menjawab stigma negatif yang sering dialamatkan kepada dunia pendidikan Islam sebagai penyebab kemunduran nalar kritis di era kontemporer. Penelaahan kembali terhadap tren pendidikan era Mughal diharapkan mampu menemukan kembali mata rantai yang hilang mengenai sistem pendidikan yang pernah menjunjung tinggi rasionalitas dan kesatuan ilmu atau Tauhidul 'Ulum. Rekonstruksi sejarah ini menjadi krusial sebagai landasan filosofis bagi reformasi madrasah modern agar mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati diri aslinya. Upaya ini bertujuan agar lembaga pendidikan Islam masa kini tidak sekadar mengadopsi sistem pendidikan Barat secara mentah, melainkan mampu menggali kekuatan intelektual dari tradisi sendiri yang telah terbukti unggul (Madni et al., 2023).

Penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran strategis dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. Sasaran utama adalah menganalisis secara kritis pergeseran orientasi kurikulum dari corak tradisionalistik menuju model integratif-rasional yang berkembang pesat pada masa kejayaan Mughal. Selain itu, kajian ini berupaya mengidentifikasi pola hubungan timbal balik antara kebijakan politik kaisar dengan tingkat keberlanjutan operasional lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut. Melalui pendekatan interkonektif, penelitian ini bermaksud merumuskan relevansi model pendidikan Dars-i-Nizami klasik terhadap tantangan penajaman nalar kritis bagi generasi Muslim di tengah kompleksitas arus informasi dunia modern saat ini (Khasyi'in, 2021).

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi historis-fenomenologis guna membedah secara mendalam dinamika lembaga pendidikan Islam pada era Mughal. Prosedur penelitian dimulai dengan tahapan heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti sumber sejarah dan literatur akademik yang mencakup buku-buku dan artikel-artikel jurnal mutakhir. Pemilihan metode ini bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara objektif dan sistematis, sehingga pola perkembangan intelektual dari masa Sultan Akbar hingga runtuhnya kekuasaan Mughal dapat terpetakan dengan akurat. Peneliti melakukan penelusuran literatur melalui basis data akademik global dan perpustakaan digital untuk mendapatkan referensi mutakhir yang mendukung validitas temuan historis (Hossain, 2025).

Tahapan selanjutnya berfokus pada verifikasi atau kritik sumber, baik secara eksternal maupun internal, untuk memastikan autentisitas dan kredibilitas data yang ditemukan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten (content analysis) dengan

perspektif interkonektif yang menghubungkan teori pedagogi, sosiologi, dan sejarah. Proses ini melibatkan interpretasi mendalam terhadap teks-teks kurikulum guna melihat sejauh mana integrasi antara ilmu rasional (ma'qulat) dan ilmu agama (manqulat) diimplementasikan dalam ruang kelas. Melalui pisau analisis ini, keterkaitan antara kebijakan politik kaisar dengan stabilitas institusi pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah ekosistem yang saling memengaruhi satu sama lain (Robinson, 2021).

Langkah terakhir dalam metodologi ini adalah historiografi, yaitu penyajian hasil sintesis data ke dalam sebuah narasi ilmiah yang logis dan kronologis. Peneliti melakukan triangulasi data untuk menjamin objektivitas penafsiran, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak terjebak pada subjektivitas sejarah semata. Fokus utama dalam tahap penulisan ini adalah merumuskan relevansi nilai-nilai pendidikan Mughal terhadap problematika nalar kritis di lembaga pendidikan Islam kontemporer. Upaya sistematis tersebut diharapkan mampu menghasilkan sebuah model teoretis yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum madrasah modern yang tetap berpijak pada kekuatan tradisi intelektual Islam yang rasional (Madni et al., 2023).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Tipologi dan Arsitektur Lembaga (Struktur Pendidikan)***

Struktur kelembagaan pendidikan Islam pada era Imperium Mughal menampilkan hierarki yang sangat sistematis, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi yang bersifat spesialis. Jenjang pendidikan dasar umumnya diselenggarakan di Maktab atau Kuttab yang biasanya menyatu dengan bangunan masjid, di mana fokus utamanya adalah pemberantasan buta aksara Al-Qur'an serta pengenalan dasar-dasar syariat bagi anak-anak. Transisi menuju jenjang menengah dan tinggi terjadi di Madrasah, sebuah institusi formal yang menjadi pusat transmisi ilmu-ilmu rasional (ma'qulat) dan tradisional (manqulat). Keberadaan madrasah monumental di pusat-pusat kota seperti Delhi, Agra, dan Lahore tidak hanya berfungsi sebagai ruang kelas, tetapi juga sebagai simbol kemajuan intelektual kekaisaran yang didukung oleh perpustakaan besar serta fasilitas asrama bagi para penuntut ilmu dari berbagai wilayah (Hossain, 2025).

Aspek spiritualitas dalam sistem pendidikan ini mendapatkan ruang khusus melalui institusi Khanqah atau pusat pertemuan tarekat sufi. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam membentuk dimensi etika (adab) dan kematangan batiniah para siswa, sehingga output pendidikan tidak hanya unggul secara kognitif tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang kuat. Integrasi antara madrasah yang bersifat formal-akademis dengan Khanqah yang bersifat informal-spiritual menciptakan sebuah ekosistem pembelajaran yang holistik. Pola tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Mughal dirancang untuk melahirkan individu yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi birokrasi negara dan tuntutan ukhrawi sebagai seorang hamba (Agustin & Arbi, 2024).

Dinamika internal dalam struktur madrasah mengalami transformasi signifikan melalui kontribusi pemikiran Syekh Abdul Haq Muhaddis Dehlawi. Peran beliau sangat sentral dalam

melakukan reposisi terhadap kedudukan ilmu hadis di dalam kurikulum madrasah India yang sebelumnya sangat didominasi oleh kajian fikih dan logika. Upaya sistematis yang dilakukan beliau dalam menyebarkan sains hadis setelah kepulangannya dari Hijaz memberikan warna baru bagi wajah intelektual Mughal, di mana teks-teks hadis mulai dikaji secara kritis sebagai sumber hukum utama yang setara dengan pemikiran hukum mazhab. Kehadiran studi hadis yang mendalam ini melengkapi tradisi keilmuan yang sudah ada, sehingga madrasah di India memiliki otoritas intelektual yang diakui oleh dunia Islam internasional (Darmawan et al., 2024).

Sintesis dari keragaman bentuk lembaga ini memberikan gambaran bahwa sistem pendidikan Mughal beroperasi secara desentralisasi namun tetap memiliki standar mutu yang terjaga dengan baik. Kualitas instruksi tetap konsisten karena adanya jaringan ulama yang saling terhubung melalui mata rantai keilmuan (ijazah) yang sangat ketat, meskipun negara tidak memaksakan standarisasi tunggal yang kaku. Dukungan finansial melalui sistem wakaf dan hibah tanah menjamin otonomi lembaga pendidikan dari intervensi politik yang berlebihan, sehingga para guru memiliki kebebasan dalam mengembangkan metodologi pengajaran. Karakteristik struktur yang fleksibel namun substansial ini menjadi kunci utama bagi keberlangsungan peradaban Islam di India selama beberapa abad sebelum penetrasi sistem pendidikan kolonial dimulai (Robinson, 2021).

#### ***Patronase dan Politik Bahasa (Kebijakan Pendidikan)***

Kebijakan pendidikan pada masa Imperium Mughal sangat bergantung pada sistem patronase negara yang sistematis melalui mekanisme hibah tanah yang dikenal sebagai *Madad-i-Ma'ash*. Pendanaan ini berfungsi sebagai instrumen vital bagi keberlangsungan operasional madrasah dan masjid, sehingga institusi pendidikan memiliki kemandirian finansial yang cukup dari fluktuasi ekonomi pasar. Kaisar-kaisar Mughal, mulai dari Sultan Akbar hingga Sultan Aurangzeb, memberikan dukungan finansial yang besar kepada para ulama dan ilmuwan sebagai upaya menjaga stabilitas sosial serta legitimasi keagamaan kekaisaran. Keberadaan dana abadi atau wakaf tersebut menjamin akses pendidikan gratis bagi masyarakat luas, yang pada akhirnya memperkuat posisi pendidikan sebagai pilar utama dalam struktur peradaban India-Muslim (Agustin & Arbi, 2024).

Strategi politik bahasa juga memegang peranan sentral dalam upaya integrasi birokrasi dan intelektual di seluruh wilayah kekuasaan Mughal yang majemuk. Penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa resmi negara dan pengantar utama dalam dunia pendidikan merupakan sebuah kebijakan visioner yang melampaui sekat-sekat etnis serta agama. Bahasa Persia dipilih karena memiliki kekayaan sastra dan fleksibilitas terminologi yang diperlukan untuk mengelola administrasi hukum serta diplomasi internasional yang kompleks. Kebijakan ini memaksa seluruh lapisan masyarakat terdidik, termasuk kaum intelektual Hindu, untuk masuk ke dalam ekosistem madrasah guna menguasai bahasa tersebut agar dapat berpartisipasi dalam pemerintahan (Hossain, 2023).

Peran Raja Todar Mal, menteri keuangan di era Sultan Akbar, sangat signifikan dalam memperkuat kedudukan bahasa Persia dalam sistem pendidikan dan birokrasi. Beliau menetapkan bahwa seluruh catatan resmi dan administrasi perpajakan harus menggunakan bahasa Persia, yang

secara otomatis menjadikan penguasaan bahasa tersebut sebagai syarat mutlak bagi mobilitas sosial. Dampak dari kebijakan ini adalah lahirnya kelas menengah baru yang memiliki kesamaan nalar intelektual meskipun berbeda latar belakang keyakinan. Madrasah-madrasah pada masa tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga sektarian, melainkan bertransformasi menjadi ruang publik inklusif yang memfasilitasi dialog antarbudaya melalui perantara bahasa intelektual yang seragam (Darmawan et al., 2024).

Sinergi antara dukungan finansial negara dan standarisasi bahasa pengantar menciptakan sebuah identitas budaya baru yang dikenal sebagai kebudayaan Indo-Persia. Pola ini membuktikan bahwa pendidikan di bawah naungan Mughal tidak sekadar bertujuan untuk transmisi ajaran agama, melainkan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial guna menciptakan persatuan dalam keberagaman. Integrasi bahasa Persia dalam kurikulum madrasah memberikan bekal kemampuan retorika dan logika bagi para lulusannya, sehingga mereka mampu menjadi jembatan antara kepentingan rakyat dan kebijakan pusat kekaisaran. Keberhasilan kebijakan patronase dan politik bahasa ini menjadi fondasi bagi kokohnya pengaruh intelektual Islam di India yang bertahan hingga masuknya intervensi pendidikan kolonial Inggris (Robinson, 2021).

#### ***Dialektika Isi Kurikulum Manqulat dan Ma'qulat***

Kurikulum pendidikan Islam pada era Imperium Mughal menampilkan pergeseran paradigma yang sangat mendasar melalui integrasi antara ilmu-ilmu tradisional (manqulat) dan ilmu-ilmu rasional (ma'qulat). Fokus utama dalam isi pendidikan ini tidak lagi hanya terpaku pada hafalan teks-teks hukum klasik, melainkan mulai menekankan pada penguasaan instrumen berpikir analitis. Dialektika antara wahyu dan akal menjadi inti dari setiap materi yang diajarkan di madrasah, di mana studi tentang Al-Qur'an dan Hadis dipadukan dengan logika, filsafat, serta matematika tingkat lanjut. Pendekatan kurikulum yang seimbang ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga memiliki ketajaman intelektual dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks (Hossain, 2025).

Standarisasi pendidikan mencapai titik puncaknya melalui kehadiran kurikulum Dars-i-Nizami yang dirancang secara sistematis oleh Mulla Nizamuddin Sihawli. Keunikan dari kurikulum ini terletak pada penekanan yang sangat tinggi terhadap “ilmu alat” atau disiplin rasional seperti mantiq (logika) dan hikmah (filsafat). Mulla Nizamuddin memformulasikan metode di mana para siswa dilatih untuk memahami metodologi berpikir di balik sebuah teks, bukan sekadar menghafal isinya secara literal. Strategi pedagogis tersebut diambil agar para penuntut ilmu memiliki fleksibilitas berpikir yang diperlukan dalam menjalankan fungsi peradilan serta penasihat hukum di birokrasi kekaisaran (Robinson, 2021).

Penerapan kurikulum Dars-i-Nizami di pusat-pusat intelektual seperti Farangi Mahall membuktikan bahwa pendidikan Islam era Mughal sangat menghargai rasionalitas sebagai pelengkap keimanan. Pengajaran logika dalam kurikulum ini berfungsi sebagai saringan intelektual yang membantu para ulama dalam melakukan ijtihad serta merumuskan solusi atas problematika hukum baru

yang muncul di tengah masyarakat India yang heterogen. Integrasi ilmu-ilmu rasional ini tidak serta-merta mengabaikan otoritas teks suci, melainkan justru memperkuat pemahaman terhadap teks tersebut melalui pendekatan dialektis yang sangat mendalam. Fenomena tersebut menjadikan madrasah di India sebagai mercusuar pemikiran Islam yang paling progresif di kawasan Asia Selatan pada abad ke-18 (Madni et al., 2023).

Sintesis antara *manqulat* dan *ma'qulat* dalam isi pendidikan Mughal mencerminkan visi kesatuan ilmu atau Tauhidul 'Ulum yang sangat kokoh. Kurikulum ini berhasil menjembatani kesenjangan antara kebutuhan spiritual individu dan kebutuhan praktis administrasi negara secara harmonis. Keberhasilan model pendidikan ini terlihat dari lahirnya kelas intelektual yang mampu berdialog dengan berbagai tradisi keilmuan tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Pola pendidikan yang mengedepankan nalar kritis ini menjadi warisan berharga yang terus memengaruhi struktur madrasah di wilayah India, Pakistan, dan Bangladesh hingga masa kontemporer (Juliansyah, 2025).

### ***Dinamika Intelektual Antara Puncak Keemasan dan Dekadensi***

Perjalanan intelektual pada era Imperium Mughal melewati fase perkembangan yang sangat fluktuatif, mulai dari periode sintesis budaya hingga era kodifikasi hukum yang bersifat ortodoks. Fase keemasan yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Akbar hingga Shah Jahan ditandai dengan semangat inklusivitas serta akulturasi sains yang sangat progresif. Kegiatan penerjemahan karya-karya klasik Sanskerta ke dalam bahasa Persia menjadi bukti nyata adanya keterbukaan intelektual madrasah terhadap kearifan lokal India. Integrasi seni arsitektur, astronomi, dan matematika ke dalam kurikulum pendidikan mencerminkan sebuah harmoni peradaban di mana ilmu pengetahuan berkembang tanpa sekat dogmatis yang kaku (Agustin & Arbi, 2024).

Pergeseran arah intelektual mulai terlihat pada masa Sultan Aurangzeb, di mana fokus pendidikan diarahkan kembali pada penguatan ortodoksi dan legalisme formal. Proyek besar penyusunan *Fatawa-e-Alamgiri* menjadi representasi dari upaya kodifikasi hukum Islam secara kolektif yang melibatkan ratusan ulama terkemuka. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan standarisasi hukum di seluruh wilayah kekaisaran, sisi lain dari tren ini adalah mulai berkurangnya ruang bagi spekulasi filsafat bebas yang sebelumnya berkembang pesat. Dinamika tersebut dipicu oleh respons terhadap tantangan politik internal serta keinginan untuk memurnikan akidah masyarakat dari pengaruh sinkretisme yang dianggap menyimpang (Darmawan et al., 2024).

Peran Syekh Ahmad Sirhindi sangat krusial dalam menggerakkan arus balik menuju ortodoksi melalui kritik tajamnya terhadap kebijakan liberal Sultan Akbar. Pemikiran beliau memberikan fondasi bagi para pendidik madrasah untuk memperkuat kembali pengajaran syariat dan pemurnian ajaran sufi agar tetap berpijak pada koridor Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, pada masa transisi menuju keruntuhan Mughal, Syah Waliullah al-Dehlawi muncul sebagai tokoh pembaru yang mencoba melakukan rekonsiliasi antara berbagai mazhab pemikiran. Beliau berupaya menyelamatkan institusi pendidikan dari dekadensi moral dan politik dengan cara mengintegrasikan kembali studi hadis secara mendalam guna membangkitkan kesadaran kolektif umat Islam (Khasyi'in, 2021).

Fase akhir dari dinamika pendidikan Mughal ditandai dengan dekadensi sistemis akibat penetrasi kolonial Inggris melalui East India Company. Runtuhnya struktur ekonomi agraris yang menjadi penopang sistem wakaf mengakibatkan banyak madrasah kehilangan sumber pendanaan utamanya. Kebijakan English Education Act secara perlahan menggeser posisi bahasa Persia dan kurikulum tradisional, sehingga lembaga pendidikan Islam bertransformasi menjadi institusi yang lebih defensif guna menjaga identitas agama. Penurunan kualitas intelektual di masa ini bukan disebabkan oleh kegagalan metodologi Dars-i-Nizami, melainkan akibat dari hancurnya ekosistem sosiopolitik yang selama berabad-abad telah menyokong kejayaan ilmu pengetahuan di India (Hossain, 2025).

### ***Analisis Data***

#### **Analisis Politik Pendidikan sebagai Instrumen State-Building**

Hubungan kekuasaan antara penguasa Mughal dan institusi pendidikan mencerminkan sebuah strategi pembangunan negara yang sangat terukur melalui jalur intelektual dan birokrasi. Patronase yang diberikan oleh para kaisar bukan sekadar manifestasi religiositas personal, melainkan upaya sistematis untuk menciptakan kelas birokrat loyal yang memiliki keseragaman nalar melalui standarisasi bahasa Persia (Agustin & Arbi, 2024). Penggunaan bahasa ini berfungsi sebagai instrumen unifikasi yang melampaui sekat-sekat etnis serta agama, sehingga stabilitas politik dapat terjaga dalam jangka waktu yang lama di seluruh wilayah imperium. Mekanisme tersebut memastikan bahwa setiap pejabat negara memiliki kerangka berpikir yang selaras dengan visi pusat kekaisaran, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi politik dinasti di mata rakyat maupun elit lokal. Konstruksi sistem pendidikan yang terpusat pada penguasaan administrasi dan hukum negara memberikan jaminan bagi kelancaran tata kelola wilayah India yang sangat luas dan heterogen (Hossain, 2023).

Madrasah pada periode ini bertransformasi menjadi ruang mobilitas sosial yang efektif dalam meredam potensi konflik horisontal melalui penerapan sistem meritokrasi yang inklusif. Akses terhadap kekuasaan dibuka bagi siapa pun yang mampu menguasai kurikulum negara tanpa memandang latar belakang kasta atau keturunan, sehingga tercipta stabilitas sosiopolitik yang dinamis dan kompetitif. Keberadaan sistem Madad-i-Ma'ash menghadirkan interkoneksi politik-ekonomi yang kuat, di mana hibah tanah memberikan kemandirian finansial bagi para ulama sekaligus berfungsi sebagai mekanisme kontrol halus agar institusi pendidikan tetap menjaga harmoni stabilitas kekaisaran (Robinson, 2021). Ketergantungan pada dukungan ekonomi negara menjadikan lembaga pendidikan sebagai mitra strategis pemerintah yang secara tidak langsung berkewajiban memelihara keteraturan sosial. Struktur pembiayaan ini menciptakan simbiosis di mana negara mendapatkan dukungan moral dan SDM berkualitas, sementara institusi ilmu memperoleh kepastian sumber daya untuk mentransmisikan nilai-nilai peradaban Islam di Asia Selatan (Darmawan et al., 2024).

#### **Analisis Epistemologi Manifestasi Tawhid al-Ilm (Kesatuan Ilmu)**

Integrasi antara kurikulum manqulat dan ma'qulat pada era Imperium Mughal mengandung makna filosofis mendalam mengenai penolakan terhadap dikotomi ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam. Kurikulum Dars-i-Nizami merepresentasikan sebuah visi epistemologis di mana pemisahan

antara “ilmu agama” dan “ilmu dunia” dianggap tidak relevan dalam upaya mencapai kebenaran hakiki yang bersifat tunggal. Logika atau mantiq tidak dipandang sebagai ancaman bagi keimanan, melainkan diposisikan sebagai “ibadah intelektual” yang berfungsi untuk memahami teks wahyu secara lebih presisi, analitis, dan mendalam. Pendekatan ini membuktikan bahwa tradisi intelektual Asia Selatan memiliki kapasitas yang luas dalam menyatukan dimensi rasionalitas dengan otoritas wahyu secara harmonis tanpa kehilangan esensi religiositasnya (Robinson, 2021). Penguatan pada ilmu-ilmu alat memberikan fondasi bagi para penuntut ilmu untuk tidak sekadar menjadi penghafal teks, tetapi menjadi pemikir yang mampu melakukan ijtihad secara kritis terhadap problematika sosial yang berkembang (Madni, 2023).

Penggunaan akal (Aql) di dalam madrasah Mughal menjadi instrumen utama untuk mencapai derajat Insan Kamil atau manusia paripurna yang memiliki kompetensi teknis sekaligus kekokohan spiritual. Epistemologi integratif ini menjamin bahwa setiap lulusan madrasah memiliki kesiapan mental dalam mengelola urusan duniawi tanpa melepaskan prinsip-prinsip ketauhidan sebagai kompas moral utama. Keberhasilan penyatuan kedua rumpun ilmu ini memberikan bukti sejarah bahwa puncak kemajuan peradaban Islam selalu bertumpu pada kesatuan antara intelek dan spiritualitas yang saling menguatkan. Pemilihan teks logika yang rumit berfungsi sebagai bentuk riyadhah al-fikr atau latihan mental guna membentuk karakter intelektual yang tahan banting dalam menghadapi kompleksitas hukum dan administrasi negara. Prinsip Tawhid al-Ilm yang diterapkan pada masa ini menjadi jembatan bagi lahirnya para intelektual yang mampu mensinergikan hukum Tuhan dengan realitas alam semesta secara proporsional dan aplikatif (Hossain, 2025).

### **Analisis Sosiologi ‘Asabiyyah dan Siklus Peradaban Ibnu Khaldun**

Perspektif sosiologi Ibnu Khaldun memberikan penjelasan tajam mengenai dinamika naik dan turunnya peradaban Mughal melalui lensa solidaritas intelektual atau ‘asabiyyah yang terbentuk di lembaga pendidikan. Jaringan ulama yang luas dan penggunaan kurikulum yang seragam berhasil menciptakan ikatan sosial yang sangat kuat di kalangan elit Muslim India, yang menjadi perekat persatuan kekaisaran selama berabad-abad. Kekuatan solidaritas ini muncul dari kesamaan pola pikir serta nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini melalui madrasah, sehingga tercipta rasa kepemilikan kolektif terhadap eksistensi peradaban Indo-Persia yang inklusif. Kemampuan lembaga pendidikan dalam memproduksi agen-agen sosial yang memiliki visi seragam menjadi kunci utama keberhasilan stabilitas sosial di tengah masyarakat India yang sangat plural dan majemuk. Integrasi budaya yang terjadi di ruang-ruang kelas ini melahirkan identitas sosiokultural baru yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat di bawah payung besar kekaisaran (Hossain, 2023).

Fenomena akhir era Mughal menunjukkan adanya gejala dekadensi sosiologis ketika sistem pendidikan mulai terjebak pada formalisme dan penjagaan status quo yang bersifat tradisionalisme defensif. Hilangnya daya kreatif atau umran dalam lembaga pendidikan tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi rentan terhadap tekanan penetrasi kolonial Inggris yang membawa sistem nilai dan pendidikan modern. Kemunduran ini mencerminkan fase akhir dari siklus peradaban di mana solidaritas

intelektual mulai melemah seiring dengan hilangnya orisinalitas pemikiran serta semangat inovasi. Madrasah yang semula menjadi pusat pencerahan berubah fungsi menjadi benteng pertahanan identitas yang kaku, yang pada akhirnya memicu keruntuhan ekosistem peradaban secara menyeluruh akibat kegagalan adaptasi terhadap perubahan zaman. Transformasi sosiologis ini memberikan pelajaran berharga bahwa keberlanjutan sebuah peradaban sangat bergantung pada kemampuan institusi pendidikannya dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan tuntutan pembaruan (Hossain, 2025).

### **Analisis Historis Kontinuitas Peradaban**

Posisi intelektual Mughal dalam garis waktu peradaban global menunjukkan adanya kontinuitas tradisi rasionalisme yang sebelumnya berkembang pesat pada masa keemasan Abbasiyah di Baghdad. India bertransformasi menjadi “rumah baru” bagi warisan Bayt al-Hikmah yang sempat meredup di pusat dunia Islam melalui pengaruh intelektual Persia yang sangat kuat dan migrasi para ilmuwan ke Asia Selatan. Penyerapan ilmu-ilmu rasional dari tradisi Persia ke dalam kurikulum madrasah India membuktikan bahwa transmisi pengetahuan tidak mengenal batas geografis maupun sekat politik kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa kekaisaran ini berhasil menjaga api rasionalisme Islam tetap menyala di saat wilayah Muslim lainnya mulai beralih ke arah tradisionalisme yang lebih tertutup dan statis. Keberadaan ekosistem ilmiah ini menjadikan wilayah India sebagai pusat riset dan pengembangan pengetahuan yang paling dinamis pada abad ke-17 di seluruh dunia Timur (Darmawan, 2024).

Tradisi logika dan filsafat yang berkembang di madrasah Mughal sebenarnya memiliki kemiripan pola dengan gerakan Renaissance di Barat yang menekankan pada kekuatan rasio serta observasi analitis terhadap realitas. Analisis kritis terhadap perkembangan ini menunjukkan bahwa andaikata ekosistem intelektual tersebut tidak terinterupsi oleh intervensi kolonialisme Inggris, dunia Islam memiliki potensi besar untuk melahirkan revolusi saintifiknya sendiri secara mandiri. Mata rantai yang terputus akibat penjajahan telah mengubah arah sejarah intelektual Asia Selatan dari pusat inovasi menjadi sekadar konsumen pengetahuan Barat yang dipaksakan melalui sistem pendidikan kolonial. Pemahaman terhadap kontinuitas historis ini sangat penting guna menyadari bahwa fondasi kemajuan modern telah lama eksis dalam tradisi madrasah jauh sebelum terjadinya disrupsi oleh kekuatan eksternal. Perbandingan sejarah ini memberikan gambaran objektif mengenai pergeseran poros pengetahuan dunia yang dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekonomi suatu peradaban (Juliansyah, 2025).

### **Relevansi dan Pelajaran untuk Pendidikan Islam Di Indonesia**

Belajar dari sejarah Dinasti Mughal, pesantren dan madrasah di Indonesia saat ini bisa mulai menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis. Pelajaran logika (*mantiq*) dan filsafat yang dulu sangat kuat di zaman Mughal sebenarnya adalah obat untuk mengatasi cara berpikir yang kaku atau gampang ikut-ikutan paham radikal. Jika siswa di madrasah dibiasakan berdiskusi dan berlogika dengan tajam, mereka tidak akan mudah terjebak pada hafalan semata, tapi benar-benar paham inti ajaran agama

(Khasyi'in, 2021). Semangat “kesatuan ilmu” yang dulu sukses menyatukan ilmu agama dan umum di India, sekarang sedang diusahakan di Indonesia lewat aturan baru (KMA 183 & 184). Tujuannya jelas agar siswa madrasah kita jago mengaji tapi juga pintar sains, sehingga tidak ada lagi tembok pemisah antara “anak agama” dan “anak umum” (Madni, 2023).

Selain soal kurikulum, kemandirian sekolah Islam juga sangat bergantung pada dukungan dana yang stabil. Di zaman Mughal, ada sistem hibah tanah (Madad-i-Ma'ash) yang membuat para guru bisa fokus mengajar tanpa pusing memikirkan biaya hidup. Pelajaran ini sangat cocok dengan kebijakan Dana Abadi Pesantren yang sekarang sedang digulirkan pemerintah Indonesia. Maknanya, kalau pesantren punya dana yang kuat dan mandiri, mereka tidak akan gampang disetir oleh kepentingan politik atau pasar. Dengan ekonomi yang mapan, pesantren bisa tetap kritis dan bebas mengembangkan ilmu pengetahuan. Refleksi dari sejarah Mughal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam di Indonesia punya masa depan cerah kalau kita bisa menjaga kemandirian ekonomi sekaligus tetap terbuka pada kemajuan zaman (Agustin & Arbi, 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa tren lembaga pendidikan Islam pada era Dinasti Mughal merupakan salah satu model pendidikan yang paling maju dan terintegrasi dalam sejarah peradaban Islam. Kekuatan sistem pendidikan ini terletak pada kemampuannya menyatukan ilmu agama (manqulat) dengan ilmu rasional (ma'qulat) melalui kurikulum Dars-i-Nizami. Dukungan penuh dari negara melalui sistem hibah tanah (Madad-i-Ma'ash) dan penggunaan bahasa Persia sebagai bahasa intelektual terbukti berhasil menciptakan stabilitas sosial serta melahirkan kelas birokrat yang cerdas sekaligus religius di tengah masyarakat India yang sangat majemuk.

Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa kemunduran lembaga pendidikan Islam di masa akhir Mughal bukan disebabkan oleh kegagalan kurikulumnya, melainkan karena hancurnya ekosistem ekonomi dan politik akibat penjajahan kolonial Inggris. Hal ini memberikan pesan kuat bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia saat ini untuk mencetak generasi yang unggul dan kritis, madrasah serta pesantren perlu menghidupkan kembali semangat kesatuan ilmu (Tauhid al-Ilm) dan menjaga kemandirian ekonomi melalui kebijakan seperti Dana Abadi Pesantren. Dengan nalar kritis yang tajam dan fondasi ekonomi yang mandiri, pendidikan Islam akan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri tradisinya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan sekaligus penulisan artikel ini.

## **REFERENSI**

Agustin, S. M., & Arbi. (2024). Kerajaan Mughal: Puncak peradaban Islam di tengah dominasi agama

- Hindu di India. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 36463–36469.  
<https://jptam.org/index.php/jptam>
- Darmawan, F. (2024). A study on Islamic culture during the Mughal era in India. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 3(5). <https://doi.org/10.61445/tofedu.v3i5.310>
- Hossain, M. K. (2023). Madrasah education under Muslim rulers in India: A study of Mughal emperor. *Journal of Advanced Education and Sciences*, 2(1), 13–18.
- Hossain, M. K. (2025). An analytical overview of the historical development of madrasah education in the medieval Muslim world. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 9(1). <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.903SEDU0406>
- Juliansyah. (2025). Masa pembaruan pendidikan Islam di India. *Journal of Appisi*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.573>
- Khasyi'in, N. (2021). Kajian pendidikan Islam di India. *Adiba: Journal of Education*, 1(1), 178–185.
- Madni, A. H. (2023). The relevance of the Dars-e-Nizami curriculum to the development of modern Islamic religious education in Pakistan. *Eduprof Islamic Education Journal*, 5(2), 63–73. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v5i2.231>
- Robinson, F. (2021). *The 'Ulama of Farangi Mahall and Islamic culture in South Asia*. Oxford University Press.